



# Danais untuk Kemiskinan

JOGJA—Pemda DIY membagikan miliaran rupiah dana keistimewaan (danais) kepada kabupaten dan kota hingga kelurahan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di 2022.

Sunartono  
[sunartono@harianjogja.com](mailto:sunartono@harianjogja.com)

- ▶ Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta kepada kabupaten, kota, dan kelurahan, agar memperhatikan sejumlah hal penting dalam pelaksanaan keistimewaan.
- ▶ Lurah dan pamong ingin lebih dilibatkan dalam pengambilan kebijakan keistimewaan DIY.

Duit ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan hingga perdesaan, mulai dari infrastruktur hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta kepada kabupaten, kota, dan kelurahan, agar memperhatikan sejumlah hal penting dalam pelaksanaan keistimewaan.

Hal ihwal itu adalah menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan pelaksanaan. Selain itu, pencapaian kinerja danais harus menghasilkan *outcome* atau dampak yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

## Danais Untuk...

Pemanfaatan danais diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, pengentasan pengangguran, mengurangi kesenjangan antarwilayah, mendorong investasi, penanganan dampak Covid-19, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kalurahan sebagai *center of excellent*.

HB X juga meminta ada optimalisasi kontrol terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* serta evaluasi (*money*) danais seiring semakin banyaknya OPD pelaksana danais.

"BKK Danais bukan untuk cadangan dan bukan hanya milik Pemda DIY. Semua kabupaten dan kota harus saling *handarbeni* [merasa memiliki], sehingga BKK Danais menjadi bagian prioritas pembangunan di kabupaten dan kota," ucap Sultan dalam sambutannya saat penyerahan BKK Danais Tahun Anggaran 2022, Senin (27/12).

Sultan menambahkan taman budaya yang sudah dibangun harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Sementara, bagi yang akan membangun taman budaya harus mematangkan konsep perencanaan konstruksinya serta perlu melihat kejelasan status lahan dan memperhatikan potensi kearifan lokal sebelum membangun.

"Kemudian harus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mendesain kegiatan, agar menjadi *branding* yang dapat dipromosikan ke luar DIY dan negeri," ujarnya.

Raja Ngayogyakarta ini berharap BKK danais dapat memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, menurunkan angka

kemiskinan dan pengangguran, memberdayakan masyarakat dan menciptakan investasi bagi masyarakat. "Maka BKK Danais ini semestinya dapat menjadi refleksi kerja kolaboratif antarpemangku kepentingan," katanya.

HB menekankan sejumlah prioritas pembangunan menggunakan danais yang memerlukan kolaborasi antardaerah di DIY. Prioritas itu terdiri atas pembangunan infrastruktur di Prambanan-Lemahabang, penataan Sumbu Filosofi, penataan Kawasan Menoreh, penataan Pantai Selatan, dan pengembangan kawasan perkotaan di Kota Jogja. "Telah ditetapkan 18 desa mandiri budaya se-DIY. Secara umum pengembangan potensi dan pemberdayaan kalurahan mencakup 11 kebijakan strategis," ujarnya.

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana menyatakan BKK Danais diberikan kepada Sleman dengan angka Rp196,4 miliar, Kulonprogo Rp50,4 miliar, Kota Jogja Rp44,6 miliar, Bantul Rp30,3 miliar, dan Gunungkidul Rp36,2 miliar.

Kemudian untuk pengembangan potensi dan pemberdayaan kalurahan mencakup 11 kebijakan strategis Gubernur DIY sebesar Rp98 miliar. Pin itu terdiri atas balai budaya Rp6,8 miliar pada lima kalurahan, desa mandiri budaya Rp19,6 miliar di 18 kalurahan, penanda keistimewaan Rp18,9 miliar untuk 302 kalurahan, arsitektur Yogyakarta Rp5,9 miliar di tujuh kalurahan. Kemudian desa budaya Rp8,7 miliar di 16 kalurahan, desa mandiri pangan Rp 1,5 miliar di dua

kalurahan, desa prima Rp1,2 miliar, padat karya Rp19,4 miliar pada 110 kalurahan, desa wisata Rp7 miliar di 11 kalurahan dan desa maritim Rp4,7 miliar untuk tujuh kalurahan.

"BKK papan penanda keistimewaan ini berupa papan nama kalurahan dengan bangunan berarsitektur Jogja yang di 2022 akan menyasar sebanyak 301 kalurahan di DIY," katanya.

Ketua Paguyuban Ismaya, Bibit Rustamta menuturkan salah satu tujuan keistimewaan DIY adalah demokratisasi di tingkat desa. Sebagai salah satu pejuang keistimewaan, lurah dan pamong ingin lebih dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. "Harapannya Ismaya bisa menyampaikan informasi dan aspirasi dari bawah," ujarnya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima *Harian Jogja*, Senin.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewaan DIY Aris Eko Nugroho mengatakan pemanfaatan dana keistimewaan (Danais) saat ini berbasiskan proposal yang ditujukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemda DIY. Aris mendukung sepenuhnya Ismaya yang menginginkan danais tersebar merata ke seluruh kalurahan di DIY.

### Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang mengurus cukup banyak danais adalah pembuatan jalan baru penghubung Sleman dan Gunungkidul. Pemda DIY menggelontorkan anggaran lewat danais senilai Rp173 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan jalan di

Lemahabang, Prambanan, Sleman. Jalan ini akan menghubungkan Gading-Ngalang yang berada di Gunungkidul dengan Lemahabang, Prambanan, Sleman.

Aris Eko Nugroho menjelaskan pembebasan lahan untuk jalur Gading-Ngalang-Lemahabang terbagi dalam lima segmen. Tiga segmen telah selesai secara bertahap. Selanjutnya, anggaran sekitar Rp190 miliar dipakai untuk membebasan lahan di segmen keempat yang belum tuntas. Pada 2022, Rp173 miliar dianggarkan untuk menyelesaikan pembebasan lahan di segmen keempat.

"Pembebasan lahan untuk wilayah Gunungkidul sudah selesai, pada 2021 mulai pembebasan lahan di Prambanan, Sleman, angkanya antara Rp190 miliar sampai Rp200 miliar. Nah, pada 2022 dianggarkan lagi pakai danais Rp173 miliar," katanya di sela-sela acara penyerahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Danais di Bangsal Kepatihan.

Lahan yang dibebaskan pada 2022 di wilayah Prambanan itu memiliki panjang sekitar 9,6 kilometer. Jalan ini dapat menghubungkan pinggir Gunungkidul dan Sleman sehingga dapat mendorong perekonomian lokal. Jalan ini juga bisa menjadi akses ke beberapa tempat wisata seperti Nglangeran, Gunungkidul dan Tebing Breksi yang berada di Sleman.

Jika pembebasan lahan segmen keempat belum tuntas, Pemda DIY akan menunggu tim *appraisal* dari Pemkab Sleman untuk kembali menganggarkan pembebasan lahan menggunakan danais di tahun berikutnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005